ANALISIS BELANJA INFRASTRUKTUR BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BENGKULU

Muhammad Revanes
NPP. 33.0270
Program Studi Keuangan Publik
Email: muhammadrevanes39@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Siti Mundiroh, S.S., M.Ak.
Email pembimbing: siti.mundiroh13@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Bengkulu City allocates a relatively small and fluctuating share of regional expenditure to public-service infrastructure. During 2021-2024, the proportion reached only 14.67%-22.21%, far below the minimum 40% direction stipulated by the Law on Central and Regional Financial Relations. Previous studies mostly examine the economic impact of infrastructure expenditure or regional fiscal inequality, while limited qualitative evidence explains how infrastructure expenditure is managed through accountability, value for money, honesty, transparency, and control.* ***Purpose:*** *This study analyzes infrastructure expenditure management based on regional financial management principles in Bengkulu City.* ***Method:*** *A descriptive qualitative approach was applied. Data were obtained through semi-structured interviews with five purposively selected officials of the Bengkulu City Regional Financial and Asset Management Agency, observation, and analysis of budget realization reports and audit documents for 2021-2024. Data validity was strengthened through source and technique triangulation, while analysis followed data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *Administrative accountability was supported by formal reporting and audit mechanisms, but regulatory accountability remained weak because the infrastructure allocation did not meet the statutory threshold. Financial management was economical and fairly effective, with realization ratios of 83.68%-86.09%, but inefficient because the expenditure efficiency ratio exceeded 100%. Transparency had been promoted through public information media, although detailed and accessible budget disclosure remained limited. Fiscal control was the critical weakness because personnel expenditure absorbed 46.97%-50.57% of total expenditure and reduced fiscal space for infrastructure.* ***Conclusion:*** *Infrastructure expenditure management in Bengkulu City has applied regional financial management principles unevenly. Stronger preventive fiscal control, expenditure restructuring, revenue enhancement, and transparent performance monitoring are required to increase the infrastructure allocation.*
Keywords: *accountability; Bengkulu City; fiscal control; infrastructure expenditure; regional finance*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Pemerintah Kota Bengkulu mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam porsi yang relatif kecil dan fluktuatif. Pada 2021-2024, proporsinya hanya 14,67%-22,21% dari belanja daerah, jauh di bawah arah batas minimal 40% dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penelitian sebelumnya lebih banyak menilai dampak ekonomi belanja infrastruktur atau ketimpangan fiskal, sedangkan kajian kualitatif yang menjelaskan pengelolaan belanja berdasarkan akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis belanja infrastruktur berdasarkan prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan daerah di Kota Bengkulu. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur kepada lima pejabat BPKAD Kota Bengkulu yang dipilih secara purposive, observasi, serta telaah Laporan Realisasi Anggaran dan dokumen pemeriksaan periode 2021-2024. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Akuntabilitas administratif didukung pelaporan dan audit, tetapi kepatuhan terhadap mandat alokasi infrastruktur masih lemah. Pengelolaan tergolong ekonomis dan cukup efektif dengan rasio realisasi 83,68%-86,09%, tetapi tidak efisien karena rasio efisiensi melampaui 100%. Transparansi telah didukung media informasi publik, namun rincian anggaran belum sepenuhnya mudah diakses. Pengendalian fiskal menjadi kelemahan utama karena belanja pegawai menyerap 46,97%-50,57% belanja daerah dan mempersempit ruang fiskal. **Kesimpulan:** Pengelolaan belanja infrastruktur telah menerapkan prinsip keuangan daerah secara tidak merata. Pemerintah perlu memperkuat pengendalian preventif, merestrukturisasi belanja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperjelas pemantauan kinerja anggaran.
Kata kunci: akuntabilitas; belanja infrastruktur; keuangan daerah; Kota Bengkulu; pengendalian fiscal

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Belanja infrastruktur merupakan instrumen utama pemerintah daerah untuk menyediakan jalan, drainase, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana publik lain yang menopang produktivitas serta kualitas pelayanan. Kualitas belanja tidak cukup dinilai dari besar anggaran. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan menghasilkan aset yang bermanfaat, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Literatur internasional menunjukkan bahwa manfaat modal publik dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, efisiensi manajemen investasi, dan kemampuan pemerintah mengendalikan proyek sejak tahap penilaian hingga evaluasi (Dabla-Norris et al., 2012; Calderón et al., 2015; Bom & Ligthart, 2014).

Dalam konteks keuangan daerah, otonomi fiskal menuntut keseimbangan antara kemandirian pendapatan dan kualitas komposisi belanja. Desentralisasi dapat meningkatkan respons pemerintah terhadap kebutuhan lokal, tetapi hasilnya bergantung pada kapasitas institusi, tata hubungan fiskal, dan disiplin anggaran (de Mello, 2000). Kajian dosen IPDN juga menegaskan bahwa penyusunan APBD, perencanaan anggaran berbasis SIPD, kemandirian keuangan, penatausahaan aset, serta kualitas laporan keuangan memerlukan perencanaan yang konsisten, data yang valid, dan akuntabilitas yang kuat (Agustina et al., 2023; Tumija & Ramadhan, 2023; Sinurat et al., 2023; Tumija et al., 2024; Wahyudi et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengarahkan belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dari total belanja daerah, dengan masa penyesuaian sampai 2027. Kebijakan tersebut menuntut pemerintah daerah mengendalikan belanja rutin dan memperbesar belanja produktif. Hamdani dan Zaenudin (2023) menunjukkan bahwa penerapan UU HKPD menuntut restrukturisasi belanja pegawai agar ruang fiskal daerah tidak terkunci oleh pengeluaran rutin.

Data Kota Bengkulu menunjukkan masalah yang nyata. Rasio kemandirian daerah selama 2021-2024 berada pada 14,90%-16,76%. Pada periode yang sama, belanja infrastruktur hanya 14,67%-22,21% dari belanja daerah. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan terhadap transfer pusat dan lemahnya kapasitas APBD dalam mengamankan alokasi infrastruktur. Persoalan tersebut relevan dikaji karena belanja infrastruktur yang rendah dapat menghambat kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Esfahani dan Ramírez (2003) menegaskan bahwa infrastruktur akan

produktif ketika didukung institusi yang efektif, sedangkan Flyvbjerg et al. (2002) menunjukkan bahwa kelemahan perencanaan dan pengendalian dapat menimbulkan deviasi biaya proyek publik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kesenjangan empiris penelitian terletak pada perbedaan antara kewajiban normatif dan kondisi anggaran aktual. Pemerintah Kota Bengkulu harus meningkatkan porsi belanja infrastruktur menuju 40%, tetapi realisasi 2021-2024 tidak pernah mencapai seperempat total belanja daerah. Pada saat yang sama, rasio efektivitas penyerapan belanja infrastruktur tergolong cukup efektif. Artinya, masalah utama tidak hanya berada pada pelaksanaan anggaran, tetapi pada komposisi APBD dan pengendalian alokasi sejak tahap perencanaan.

Kesenjangan akademik muncul karena banyak penelitian menilai pengaruh belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan, kemiskinan, atau ketimpangan, sedangkan kualitas tata kelolanya belum dibahas secara utuh. Kajian efisiensi sektor publik sering menggunakan ukuran agregat lintas negara (Afonso et al., 2005), sementara studi pengeluaran publik menekankan bahwa hasil belanja sangat bergantung pada kualitas tata kelola (Rajkumar & Swaroop, 2008). Penelitian tentang investasi publik juga memperlihatkan risiko proyek yang buruk ketika akuntabilitas politik dan pengawasan lemah (Keefer & Knack, 2007). Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menghubungkan data keuangan 2021-2024, pengalaman pengelola anggaran, dan lima prinsip pengelolaan keuangan daerah pada satu objek spesifik, yaitu belanja infrastruktur Kota Bengkulu.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena masa transisi pemenuhan proporsi belanja dalam UU HKPD semakin terbatas. Tanpa diagnosis yang jelas, pemerintah daerah berisiko hanya mengejar penyerapan anggaran tanpa memperbaiki struktur belanja. Dampaknya adalah ruang fiskal tetap sempit, pemeliharaan layanan publik tertunda, dan ketergantungan terhadap transfer pusat terus berlangsung. Indeks efisiensi investasi publik menempatkan perencanaan, seleksi, implementasi, dan evaluasi sebagai satu rantai yang menentukan nilai aset publik (Dabla-Norris et al., 2012). Oleh karena itu, hasil penelitian dibutuhkan BPKAD dan TAPD Kota Bengkulu sebagai dasar pengendalian belanja operasional, peningkatan PAD, serta penetapan prioritas infrastruktur yang realistis dan terukur.

1.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan

No.	Peneliti/Tahun	Fokus	Temuan Utama
1	Agustina et al. (2023)	Penyusunan APBD dan strategi realokasi anggaran	Perencanaan adaptif membutuhkan analisis internal-eksternal dan koordinasi antarperangkat daerah.
2	Tumija & Ramadhan (2023)	Efektivitas perencanaan anggaran melalui SIPD	SIPD mendukung integrasi dan akuntabilitas, tetapi terlambatnya input dan verifikasi menghambat proses.
3	Sinurat et al. (2023)	Kemandirian keuangan daerah	Kemandirian meningkat ketika PAD dan efektivitas pengelolaan keuangan menguat.

No.	Peneliti/Tahun	Fokus	Temuan Utama
4	Tumija et al. (2024)	Penatausahaan aset dan akuntabilitas laporan	Kualitas administrasi aset menentukan akuntabilitas laporan keuangan daerah.
5	Wahyudi et al. (2024)	SIPD dan kualitas laporan keuangan	Optimalisasi sistem memerlukan kualitas informasi, kompetensi pengguna, dan evaluasi.
6	Dabla-Norris et al. (2012)	Efisiensi investasi publik	Efisiensi ditentukan oleh appraisal, seleksi, implementasi, dan evaluasi proyek.
7	Rajkumar & Swaroop (2008)	Pengeluaran publik dan hasil pembangunan	Tata kelola yang baik memperkuat hubungan antara pengeluaran publik dan hasil layanan.
8	Afonso et al. (2005)	Efisiensi sektor publik	Efisiensi publik berbeda menurut kualitas institusi dan struktur pengeluaran.
9	Calderón et al. (2015)	Produktivitas modal infrastruktur	Modal infrastruktur berkontribusi pada output, tetapi efeknya berbeda antarnegara.
10	Bom & Ligthart (2014)	Meta-analisis produktivitas modal publik	Dampak modal publik dipengaruhi jenis aset, horizon analisis, dan metode pengukuran.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian terletak pada analisis belanja infrastruktur Kota Bengkulu melalui lima prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian. Penelitian tidak berhenti pada perhitungan rasio. Data anggaran, dokumen pemeriksaan, serta keterangan pejabat BPKAD dipadukan untuk menjelaskan mengapa penyerapan belanja cukup efektif, tetapi proporsi infrastruktur tetap rendah. Penelitian juga menempatkan mandat minimum 40% UU HKPD sebagai tolok ukur kepatuhan regulatif dan pengendalian fiskal.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belanja infrastruktur berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah di Kota Bengkulu.

II. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menghitung rasio belanja, tetapi juga menjelaskan proses, pertimbangan, kendala, dan tindakan pengendalian yang melatarbelakangi komposisi APBD. Pemilihan metode ini konsisten dengan penelitian keuangan daerah yang memadukan wawancara, observasi, dan

dokumentasi untuk menilai proses anggaran, penatausahaan aset, dan penggunaan sistem informasi (Agustina et al., 2023; Tumija & Ramadhan, 2023; Tumija et al., 2024; Wahyudi et al., 2024).

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima pejabat BPKAD Kota Bengkulu yang dipilih secara purposive berdasarkan kewenangan dan pengetahuannya terhadap perencanaan, pelaksanaan, perbendaharaan, evaluasi, dan pelaporan keuangan daerah. Kepala BPKAD menjadi informan kunci karena memiliki tanggung jawab strategis terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Data sekunder berasal dari Laporan Realisasi Anggaran, APBD, LHP BPK, dokumen perencanaan, dan data pendukung periode 2021-2024.

Tabel 2. Informan penelitian

No.	Informan	Peran dalam Penelitian
1	Kepala BPKAD Kota Bengkulu	Informan kunci terkait kebijakan dan pengendalian fiskal.
2	Sekretaris BPKAD Kota Bengkulu	Informasi koordinasi organisasi dan administrasi pengelolaan anggaran.
3	Kepala Bidang Anggaran	Informasi perencanaan dan penyusunan komposisi APBD.
4	Kepala Bidang Perbendaharaan	Informasi pelaksanaan, penatausahaan, dan realisasi belanja.
5	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan	Informasi evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pemeriksaan.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumen anggaran, dan dokumen pemeriksaan. Analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Penelitian lapangan dilaksanakan selama Januari 2026 di BPKAD Kota Bengkulu. Data dianalisis menggunakan lima dimensi pengelolaan keuangan daerah dari Halim, yaitu akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan difokuskan pada satu tema utama, yaitu kualitas pengelolaan belanja infrastruktur Kota Bengkulu berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Kelima dimensi digunakan sebagai bagian yang saling berhubungan dalam menjelaskan kesenjangan antara penyerapan anggaran dan proporsi infrastruktur dalam APBD.

3.1. Profil Fiskal dan Belanja Infrastruktur

Rasio kemandirian Kota Bengkulu berada pada tingkat rendah, yaitu 14,90% pada 2021, 16,76% pada 2022, 16,19% pada 2023, dan 15,73% pada 2024. PAD meningkat secara nominal, tetapi pertumbuhannya belum mampu mengurangi dominasi transfer pusat. Kondisi ini sejalan dengan Sinurat et al. (2023), yang menempatkan struktur pendapatan dan efektivitas pengelolaan sebagai penentu kemandirian fiskal. Dalam kerangka desentralisasi, ketergantungan transfer membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalihkan anggaran menuju belanja produktif (de Mello, 2000).

Tabel 3. Indikator utama keuangan dan belanja infrastruktur Kota Bengkulu 2021-2024

Tahun	Kemandirian Daerah	Porsi Infrastruktur	Rasio Efisiensi	Rasio Efektivitas	Porsi Belanja Pegawai
2021	14,90%	15,87%	103,09%	86,09%	50,57%
2022	16,76%	19,12%	104,47%	85,76%	47,84%
2023	16,19%	22,21%	105,33%	84,86%	46,97%
2024	15,73%	14,67%	103,98%	83,68%	50,47%

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

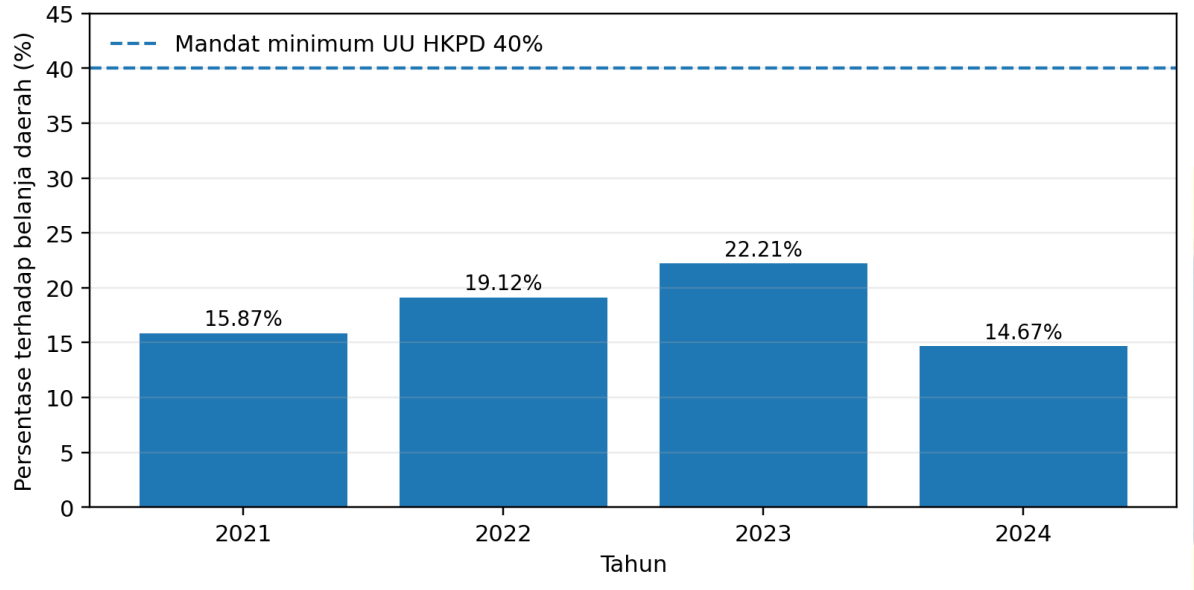

Gambar 1. Proporsi belanja infrastruktur dibandingkan mandat minimum UU HKPD
Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa proporsi belanja infrastruktur tidak hanya berada di bawah 40%, tetapi juga tidak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Puncak 22,21% pada 2023 turun menjadi 14,67% pada 2024. Temuan ini menguatkan pandangan Dabla-Norris et al. (2012) bahwa kualitas investasi publik ditentukan oleh sistem pengelolaan yang mampu menghubungkan prioritas, seleksi, implementasi, dan evaluasi. Efisiensi modal publik juga tidak otomatis terbentuk hanya dengan menambah anggaran, sebab jenis investasi dan kualitas implementasi menentukan produktivitasnya (Calderón et al., 2015; Bom & Ligthart, 2014).

3.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas administratif tergolong baik karena Pemerintah Kota Bengkulu menyusun laporan keuangan dan menjalani pemeriksaan eksternal. Opini Wajar Tanpa Pengecualian menunjukkan bahwa penyajian laporan secara umum memenuhi standar. Namun, akuntabilitas regulatif belum terpenuhi karena proporsi belanja infrastruktur tidak mencapai ketentuan UU HKPD. Selain itu, dokumen pemeriksaan masih mencatat kelemahan pengendalian pada pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa opini laporan keuangan tidak dapat menjadi

satu-satunya indikator kualitas pengelolaan. Penatausahaan aset dan kualitas informasi keuangan perlu terhubung dengan kepatuhan atas sasaran anggaran (Tumija et al., 2024; Wahyudi et al., 2024).

3.3. Value for Money

Dimensi value for money memberikan hasil yang berbeda pada aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pemerintah melakukan rasionalisasi dan penyesuaian nilai input pada beberapa komponen belanja infrastruktur sehingga aspek ekonomis dinilai cukup baik. Akan tetapi, rasio efisiensi berada pada 103,09%-105,33% dan termasuk tidak efisien berdasarkan kriteria yang digunakan dalam skripsi. Sebaliknya, rasio efektivitas realisasi belanja infrastruktur mencapai 83,68%-86,09% dan dikategorikan cukup efektif. Temuan ini berarti target kegiatan relatif terserap, tetapi struktur pengeluaran secara keseluruhan belum efisien. Afonso et al. (2005) menegaskan bahwa efisiensi sektor publik harus menilai hasil terhadap penggunaan sumber daya, sedangkan Rajkumar dan Swaroop (2008) menunjukkan bahwa tata kelola menentukan apakah pengeluaran benar-benar menghasilkan layanan publik yang lebih baik.

3.4. Kejujuran dan Kepatuhan

Pelaksanaan anggaran secara umum didukung prosedur formal, pemisahan fungsi, dan pemeriksaan. Namun, dokumen LHP BPK mencatat ketidaktertiban yang menimbulkan kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan. Temuan tersebut tidak langsung menunjukkan penyelewengan sistematis, tetapi memperlihatkan risiko ketidakcermatan administrasi dan pengawasan kontrak. Keefer dan Knack (2007) menjelaskan bahwa investasi publik rentan menghasilkan proyek bernilai rendah ketika mekanisme akuntabilitas dan pengawasan lemah. Karena itu, kejujuran dalam penelitian ini perlu dipahami bersama kepatuhan dokumentasi, validitas bukti, dan tindak lanjut korektif.

3.5. Transparansi

Pemerintah Kota Bengkulu telah menyampaikan informasi pembangunan melalui papan proyek, videotron, media pemerintah, dan portal APBD. Langkah tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dasar. Namun, informasi yang tersedia belum selalu menjelaskan hubungan antara pagu, realisasi, output, progres fisik, dan manfaat proyek dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Transparansi harus bergerak dari sekadar publikasi angka menuju informasi kinerja yang dapat dibandingkan. Temuan Agustina et al. (2023) dan Tumija dan Ramadhan (2023) menunjukkan bahwa kualitas proses penganggaran bergantung pada keterpaduan informasi dan ketepatan input, sedangkan Flyvbjerg et al. (2002) mengingatkan bahwa informasi proyek yang tidak realistis dapat menutupi risiko biaya dan keterlambatan.

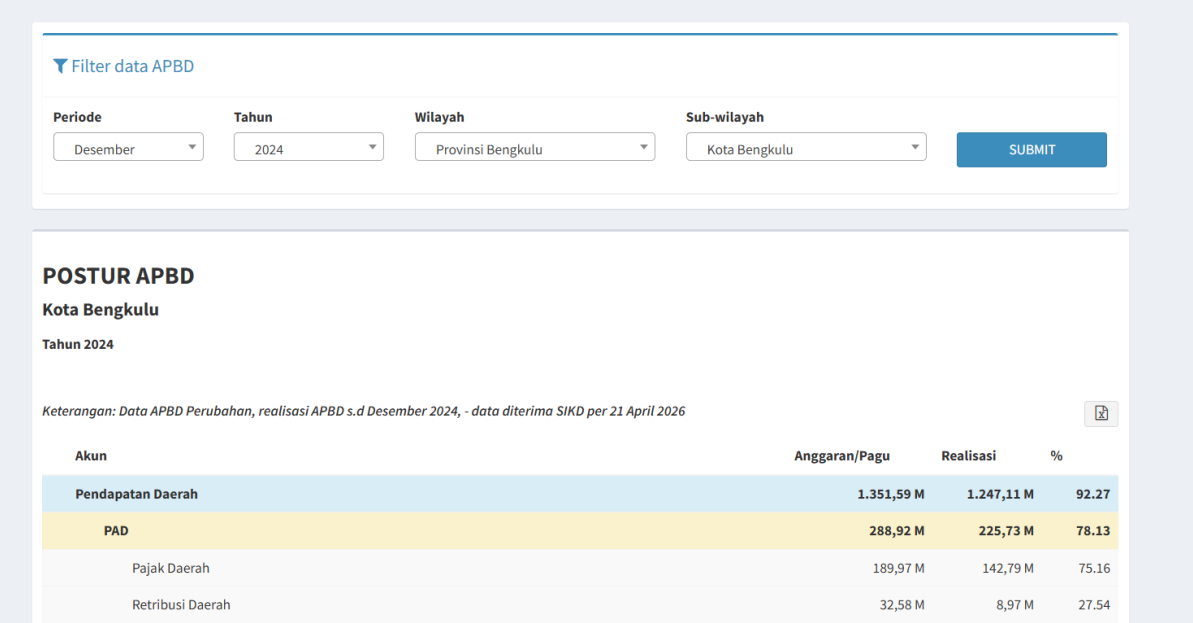

Gambar 2. Portal informasi APBD sebagai sarana transparansi fiskal
Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

3.6. Pengendalian

Pengendalian merupakan dimensi paling menentukan. Porsi belanja pegawai mencapai 46,97%-50,57% dari belanja daerah, sedangkan UU HKPD mengarahkan batas maksimum 30% setelah masa transisi. Dominasi belanja pegawai mempersempit ruang fiskal dan membuat alokasi infrastruktur bergantung pada sisa kapasitas anggaran. Hamdani dan Zaenudin (2023) juga menemukan bahwa pengendalian belanja pegawai merupakan tantangan utama penyesuaian UU HKPD. Di tingkat operasional, keterlambatan lelang, perubahan prioritas, dan verifikasi anggaran ikut menghambat realisasi. Temuan ini selaras dengan Tumija dan Ramadhan (2023), yang menekankan pentingnya ketepatan input dan verifikasi dalam perencanaan anggaran.

Pengendalian perlu bergeser dari pola reaktif setelah temuan pemeriksaan menuju pola preventif. Pemerintah harus menetapkan pagu pengaman belanja infrastruktur, melakukan review belanja pegawai dan belanja barang, memperkuat prakiraan PAD, serta menerapkan evaluasi proyek berdasarkan output dan manfaat. Dabla-Norris et al. (2012) menempatkan appraisal dan evaluasi sebagai tahap inti investasi publik, sedangkan Esfahani dan Ramírez (2003) menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan menentukan produktivitas infrastruktur. Dengan demikian, target 40% tidak cukup dipenuhi melalui pemindahan klasifikasi anggaran, tetapi harus didukung proyek yang layak, siap dilaksanakan, dan memberikan manfaat publik.

3.7. Sintesis Temuan Utama

Tabel 4. Sintesis kualitas pengelolaan belanja infrastruktur

Dimensi	Temuan Utama	Arah Perbaikan
Akuntabilitas	Pelaporan formal dan audit berjalan, tetapi alokasi belum patuh terhadap mandat minimum 40%.	Perkuat keterkaitan antara pertanggungjawaban laporan dan kepatuhan komposisi belanja.

Dimensi	Temuan Utama	Arah Perbaikan
Value for Money	Ekonomis dan cukup efektif, tetapi rasio efisiensi di atas 100%.	Gunakan analisis biaya-output dan evaluasi manfaat proyek.
Kejujuran	Prosedur formal tersedia, tetapi masih ada temuan kepatuhan dan kelebihan pembayaran.	Perkuat verifikasi kontrak, bukti transaksi, dan tindak lanjut pemeriksaan.
Transparansi	Informasi telah dipublikasikan, tetapi rincian kinerja proyek belum mudah dipahami.	Publikasikan pagu, realisasi, progres fisik, output, dan manfaat secara terpadu.
Pengendalian	Belanja pegawai tinggi dan porsi infrastruktur berfluktuasi 14,67%-22,21%.	Terapkan pengendalian preventif dan restrukturisasi APBD menuju target UU HKPD.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Secara keseluruhan, pengelolaan belanja infrastruktur Kota Bengkulu telah memiliki fondasi akuntabilitas dan mekanisme pelaksanaan, tetapi belum mampu mengubah struktur APBD secara konsisten. Persoalan utama berada pada pengendalian fiskal, bukan semata-mata penyerapan kegiatan. Peningkatan PAD, rasionalisasi belanja rutin, kesiapan proyek, dan transparansi kinerja harus dilaksanakan secara bersamaan agar kenaikan alokasi tidak mengurangi kualitas belanja. Temuan ini mendukung literatur yang menempatkan tata kelola sebagai penghubung antara pengeluaran publik dan hasil pembangunan (Rajkumar & Swaroop, 2008) serta menunjukkan bahwa produktivitas infrastruktur bergantung pada institusi dan kualitas investasi, bukan hanya nominal anggaran (Calderón et al., 2015; Bom & Ligthart, 2014).

IV. KESIMPULAN

Pengelolaan belanja infrastruktur Kota Bengkulu berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya optimal. Akuntabilitas administratif, aspek ekonomis, penyerapan anggaran, serta mekanisme pelaporan telah berjalan cukup baik. Namun, kepatuhan regulatif, efisiensi, kedalaman transparansi, dan pengendalian fiskal masih lemah. Proporsi belanja infrastruktur selama 2021-2024 hanya mencapai 14,67%-22,21%, sedangkan belanja pegawai menyerap 46,97%-50,57% dari belanja daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal yang sempit dan komposisi APBD yang dominan pada belanja rutin menjadi penyebab utama belum terpenuhinya batas minimum 40% UU HKPD.

Pemerintah Kota Bengkulu perlu memperkuat pengendalian pada tahap perencanaan dengan menetapkan target tahunan menuju 40%, menata belanja pegawai dan belanja operasional, meningkatkan PAD berbasis data, menyiapkan proyek lebih awal, serta mempublikasikan informasi kinerja infrastruktur secara lengkap. Langkah tersebut harus disertai tindak lanjut pemeriksaan dan evaluasi manfaat agar peningkatan alokasi menghasilkan pelayanan publik yang nyata.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian berfokus pada satu pemerintah kota dan menggunakan data periode 2021-2024. Temuan menjelaskan konteks pengelolaan belanja infrastruktur Kota Bengkulu dan belum dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik kepada seluruh pemerintah daerah.

Arah Masa Depan Penelitian *(Future Work)*

Penelitian selanjutnya dapat menguji skenario restrukturisasi APBD menuju target 40%, mengukur manfaat ekonomi dan sosial proyek infrastruktur, serta membandingkan strategi perluasan ruang fiskal pada beberapa pemerintah kota.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu, para informan penelitian, dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afonso, A., Schuknecht, L., & Tanzi, V. (2005). Public sector efficiency: An international comparison. Public Choice, 123(3-4), 321-347. https://doi.org/10.1007/s11127-005-7165-2

Agustina, I., Meiyenti, I., & Kumalasari, A. R. (2023). Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di masa pandemi Covid-19 dengan pendekatan analisis SWOT. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(2), 119-129. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3413

Bom, P. R. D., & Ligthart, J. E. (2014). What have we learned from three decades of research on the productivity of public capital? Journal of Economic Surveys, 28(5), 889-916. https://doi.org/10.1111/joes.12037

Calderón, C., Moral-Benito, E., & Servén, L. (2015). Is infrastructure capital productive? A dynamic heterogeneous approach. Journal of Applied Econometrics, 30(2), 177-198. https://doi.org/10.1002/jae.2373

Dabla-Norris, E., Brumby, J., Kyobe, A., Mills, Z., & Papageorgiou, C. (2012). Investing in public investment: An index of public investment efficiency. Journal of Economic Growth, 17, 235-266. https://doi.org/10.1007/s10887-012-9078-5

de Mello, L. R. (2000). Fiscal decentralization and intergovernmental fiscal relations: A cross-country analysis. World Development, 28(2), 365-380. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00123-0

Esfahani, H. S., & Ramírez, M. T. (2003). Institutions, infrastructure, and economic growth. Journal of Development Economics, 70(2), 443-477. https://doi.org/10.1016/S0304-3878(02)00105-0

Flyvbjerg, B., Holm, M. S., & Buhl, S. (2002). Underestimating costs in public works projects: Error or lie? Journal of the American Planning Association, 68(3), 279-295. https://doi.org/10.1080/01944360208976273

Halim, A. (2019). Pengelolaan keuangan daerah (Edisi ke-4). UPP STIM YKPN.

Hamdani, H., & Zaenudin, Z. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap pengendalian belanja pegawai kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(2), 816-832. https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.836

Keefer, P., & Knack, S. (2007). Boondoggles, rent-seeking, and political checks and balances: Public investment under unaccountable governments. The Review of Economics and Statistics, 89(3), 566-572. https://doi.org/10.1162/rest.89.3.566

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Rajkumar, A. S., & Swaroop, V. (2008). Public spending and outcomes: Does governance matter? Journal of Development Economics, 86(1), 96-111. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.08.003

Sinurat, M., Sudrajat, I., & Komedi. (2023). Kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(2), 216-232. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3922

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Tumija, T., Kogoya, Y. G., & Agustina, I. (2024). Optimalisasi penatausahaan aset tetap berupa tanah dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 11(1), 15-26. https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4149

Tumija, T., & Ramadhan, A. Z. (2023). Efektivitas perencanaan anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(2), 143-157. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3528

Wahyudi, K. P., Johannes, A. W., Sinurat, M., & Romarina, A. (2024). Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Gianyar. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 11(1), 27-38. https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4381